

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013)

THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE AND EXECUTIVE CHARACTERISTIC TO TAX AVOIDANCE

(Case On Listed Manufacturing Companies In Indonesia Stock Exchange 2009-2013)

Sefnia Lora Sihaloho¹, Dudi Pratomo²

^{1,2}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹sefnialorasihaloho@students.telkomuniversity.ac.id, ²dudipratomo@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Tax Avoidance merupakan cara tindakan penghindaran pajak oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang pajak atau aturan lain yang sudah ada. Namun, pada kenyataannya penghindaran pajak adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh pemerintah karena pajak adalah sumber pendapatan terbesar negara. Pada praktiknya, masih banyak kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang mengakibatkan kerugian besar pada negara. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh *Corporate Governance* dan Karakteristik Eksekutif terhadap *tax avoidance*.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013. Sampel yang digunakan sebanyak 17 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan signifikansi 5%.

Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional, kepemilikan managerial, komisaris independen sebagai proksi dari *corporate governance* dan karakteristik eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit sebagai proksi *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax Avoidance*, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Managerial, Komisaris Independen, Komite Audit, Karakteristik Eksekutif

Abstract

Tax avoidance is an effort by taxpayer to reduce tax expense by not violating the tax laws or other existing rules. However, in fact tax avoidance is something that is not wanted by the government so the government created the rules to prevent it. In practice, still a lot of cases of tax avoidance by companies that result in huge losses in the country. This research aimed to examine the influence of corporate governance and executive characteristic to tax avoidance.

The population in this research is manufacturing companies are listed in the Indonesia Stock Exchange 2009-2013. There are 17 sample in this research which were taken by using purposive sampling method. The data were analyze by using data panel regression with level significance of 5%.

The results showed that institutional owned, managerial owned and board of commissioner as proxy of corporate governance and executive characteristic has positive significant effect on tax avoidance, while audit committee as proxy of corporate governance has no significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance*, Institutional owned, managerial owned, board of commissioner, audit committee, executive characteristic.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sebuah penerimaan yang cukup besar dan penting karena pajak digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan nasional. Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pembayaran pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan pajak (Kurnia, 2010: 144). Perlawanan terhadap pajak dapat dikelompokkan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Sebagai bentuk dari perlawanan aktif pajak tersebut adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dalam Kirhler, Maciejovsky, dan Schneider (2002), penghindaran pajak (*tax avoidance*) mengacu pada pengurangan pembayaran pajak dengan cara legal, misalnya melalui celah-celah peraturan perpajakan yang ada, berbeda dengan *tax evasion* yang mengacu pada penghindaran pajak dengan cara ilegal, misalnya melaporkan pendapatan dibawah yang sebenarnya.

Corporate governance atau tata kelola perusahaan pada dasarnya merupakan suatu system yang mengatur hubungan dewan komisaris, peran dewan direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Agoes

dan Ardan, 2009). Kasus *tax avoidance* yang pernah terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan *corporate governance* adalah kasus PT. Kaltim Prima Coal (KPC). Penghindaran pajak yang dilakukan dalam perusahaan juga tidak lepas dari kebijakan yang diambil oleh eksekutif perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya dalam perusahaan, eksekutif dikenal mempunyai 2 karakteristik, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Kasus penghindaran pajak yang berhubungan dengan *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia biasanya melibatkan transaksi-transaksi yang melibatkan perusahaan multinasional, misalnya adalah Penanaman Modal Asing (PMA).

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Untuk mengetahui kondisi *corporate governance*, karakteristik eksekutif dan *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2013. 2) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *corporate governance*, karakteristik eksekutif, terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2013. 3) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *corporate governance*, karakteristik eksekutif yaitu: a) Untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *tax avoidance* : i) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* laba dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2013. ii) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2013. iii) Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2013. iv) Untuk mempengaruhi pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2013. b) Untuk mengetahui pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2013?

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Bab I Pasal 1 definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2.1.2 Tax Avoidance

A. Pengertian Tax Avoidance

Menurut Dyreng *et al* (2008) *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan.

B. Penyebab Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance

Penyebab wajib pajak tidak patuh adalah bervariasi, sebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada Negara. Timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan. Sebab lain penyebab wajib pajak *melakukan tax avoidance* menurut Amrosio M. Lina (Nurmantu, 2003:152) adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak.

C. Pengukuran Tax Avoidance

Dalam penelitian ini penulis menggunakan proksi total *Book Tax Difference* (BTD). *Book Tax Difference* (BTD) merupakan kesenjangan atau perbedaan antara laba komersial yang dilaporkan dalam laba rugi menurut peraturan akuntansi dengan laba fiskal atau laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi untuk kepentingan perpajakan yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan negara yang bersangkutan (Bovi, 2005). Adapun rumus total *Book Tax Difference* menurut Siahaan (2012) yaitu:

$$\text{Total BTD} = (\text{EBIT} - \text{Laba Kena Pajak}) : \text{total aset tahun sebelumnya}$$

2.1.3 Corporate Governance

A. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep *corporate governance*. Teori keagenan menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan (manajer, pemilik perusahaan dan kreditor) akan berperilaku, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda.

Teori ini menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Wulandari (2006) mengungkapkan bahwa *corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dengan manajer, dan untuk menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan (Gunarsih, 2003)

B. Pengertian Corporate Governance

Cadbury Committe, seperti dikutip oleh *Forum for Corporate In Indonesia* (FCGI), menjelaskan bahwa *Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

C. Pengukuran Corporate Governance

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Jaya, Yasser dan Kartika, 2012). Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan. Kepemilikan Institusi seperti kepemilikan saham oleh bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas dan lembaga keuangan lainnya (Aini dan Cahyowati, 2011). Shliefer dan Vishney (1986) berpendapat bahwa dengan adanya hak suara yang dimiliki dalam perusahaan, pemilik institusional dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Kepemilikan institusional dapat dihitung menggunakan rasio:

$$\text{Rasio Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki oleh institusi}}{\text{Total Saham Perusahaan}} \times 100\%$$

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Pujiati dan Widanar, 2009). Semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen maka akan mengurangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingan pribadi. Kepemilikan manajerial akan memberi motivasi kepada manager untuk meningkatkan kinerja dan bertanggungjawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Kepemilikan manajerial dapat dihitung menggunakan rasio :

$$\text{Rasio Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Saham yang dimiliki oleh manajemen}}{\text{Total Saham Perusahaan}} \times 100\%$$

3. Komisaris Independen

Pohan (2008) mendefinisikan komisaris independen adalah sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham (pemilik institusional), tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan Komsaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan. Komisaris independen memiliki peran penting dalam penerapan *corporate governance* karena keberadaan dewan komisaris belum dapat memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip *corporate governance* (Hanum, 2013). Dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat terjadi keseimbangan dalam perusahaan antara manajemen perusahaan dan para *stakeholder*. Kepemilikan manajerial dapat dihitung menggunakan rasio :

$$\text{Rasio Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Jumlah Komisaris}} \times 100\%$$

4. Komite Audit

Ikatan Komite Audit (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Keberadaan komite audit diatur melalui Peraturan BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor

KEP-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara (bagi BUMN). Komite audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan

dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan memiliki komite audit paling sedikit 3 akan diberi kode 1 sedangkan jika perusahaan memiliki komite audit kurang dari 3 akan diberi kode 0.

2.1.4 Karakteristik Eksekutif

Eksekutif merupakan individu yang menempati sebuah posisi penting dalam sebuah posisi dalam system kepemimpinan dalam sebuah perusahaan dan atau suatu organisasi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis, sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam keputusan bisnis (Macrimon dan Wehrung, 1990 dalam Budiman 2012). Untuk mengetahui karakteristik eksekutif maka digunakan risiko perusahaan yang dimiliki perusahaan. Resiko perusahaan mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning*. Adapun rumus *corporate risk* yang dicerminkan oleh deviasi standar menurut Budiman dan Setiyono (2011) adalah

$$RISK = \sqrt{\frac{E}{T} (B - \sqrt{T} \cdot B) \cdot (T - 1)}$$

Dimana:

E = EBITDA dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

T = Total sampel

2.2 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2013. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria yang menjadi dasar pemilihan sampel adalah Perusahaan manufaktur yang *listing* pada Bursa Efek Indonesia secara konsisten pada tahun 2009 sampai dengan 2013, menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama tahun 2009-2013, laporan keuangan diterbitkan menggunakan mata uang rupiah., memiliki data lengkap mengenai informasi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit selama tahun 2009 sampai dengan 2013, perusahaan yang tidak menampilkan rekonsiliasi fiskal di Catatan Atas Laporan Keuangan selama tahun 2009 sampai dengan 2013, tidak mengalami kerugian dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan pajak selama tahun 2009 sampai dengan 2013. Setelah mengeliminasi terdapat 17 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e$$

Dimana:

Y = *tax avoidance*

A = konstanta

X₁ = Kepemilikan Intitusional

X₂ = Kepemilikan Managerial

X₃ = Komisaris Independen

X₄ = Komite Audit

X₅ = Karakteristik Eksekutif

b₁, ..., b₅ = Koefisien regresi

e = *error term*

3. Pembahasan

3.1 Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif variabel *tax avoidance*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan karakteristik eksekutif adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	Tax	Corporate Governance				K.EKS
		KEP.INS	KEP.MAN	KOM.IND	KOMITE	
Mean	0.023561	65.7338	5.32682	38.24706	0.69411	0.102022
Maximum	0.190132	96.0900	17.97000	50.00000	1.00000	0.315966
Minimum	-0.051278	37.1100	0.000000	25.00000	0.00000	-0.04946
Std.Deviasi	0.050077	18.2342	6.127717	8.476727	0.46351	0.069745

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015

Dari tabel diketahui bahwa nilai rata-rata dari *tax avoidance* adalah 0.023561 dan nilai standar deviasinya adalah 0.050077. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan rendahnya simpangan data variabel *tax avoidance* selama periode pengamatan. Nilai rata-rata dari kepemilikan institusional adalah 65.7338 dan nilai standar deviasinya adalah 18.2342. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan kecilnya simpangan data variabel kepemilikan institusional selama periode pengamatan. Nilai rata-rata dari kepemilikan managerial adalah 5.32682 dan nilai standar deviasinya adalah 6.127717. Standar deviasi yang lebih besar dari rata-rata menunjukkan besarnya simpangan data variabel kepemilikan managerial selama periode pengamatan.

Nilai rata-rata dari komisaris independen adalah 38.24706 dan nilai standar deviasinya adalah 8.476727. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan rendahnya simpangan data variabel komisaris independen selama periode pengamatan. Nilai rata-rata dari komite audit adalah 0.69411 dan nilai standar deviasinya adalah 0.46351. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan rendahnya simpangan data variabel komite audit selama periode pengamatan. Nilai rata-rata dari karakteristik eksekutif adalah 0.102022 dan nilai standar deviasinya adalah 0.069745. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan rendahnya simpangan data variabel karakteristik eksekutif selama periode pengamatan.

3.2 Persamaan Regresi Data Panel

Berdasarkan pengujian metode yang telah dilakukan, maka metode yang digunakan dalam regresi data panel pada penelitian ini adalah metode *random effect*.

Tabel 3. Random Effect

Dependent Variable: TAX
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/05/15 Time: 13:52
 Sample: 2009 2013
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 17
 Total panel (balanced) observations: 85
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.023695	0.033499	0.707317	0.4815
KEP_INS	-0.000929	0.000400	-2.323903	0.0227
KEP_MAN	-0.003252	0.001111	-2.926606	0.0045
KOM_IND	0.001655	0.000515	3.214653	0.0019
KOMITE	-0.007329	0.007051	-1.039504	0.3017
K_ESK	0.196081	0.061117	3.208305	0.0019

3.2.1 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui nilai koefisien determinasi bank domestik sebesar 0.246869 atau 24,6869%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan managerial, komisaris independen, komite audit dan karakteristik eksekutif mampu menjelaskan variabel dependen yaitu *tax avoidance* sebesar 24,6869%. Sedangkan sisanya 75,3131 % dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

3.2.2 Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 5, diperoleh bahwa nilai probabilitas (F-statistic) sebesar $0.000367 < 0.05$ (taraf signifikansi 5%) maka H_0 ditolak yang berarti kepemilikan institusional, kepemilikan managerial, komisaris independen, komite audit dan karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* secara simultan atau bersama-sama.

3.2.3 Uji Parsial (Uji T)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan atau menentukan signifikan atau tidak signifikan masing-masing nilai koefisien regresi secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat Berdasarkan tabel 5 dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel kepemilikan institusional (X_1) memiliki nilai probabilitas (p-value) $0.0227 < 0.05$, sesuai ketentuan pengambilan keputusan maka $H_{0.2}$ ditolak yang berarti kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan dan memiliki arah negative terhadap *tax avoidance* secara parsial. Kepemilikan institusional yang berpengaruh signifikan dan memiliki arah negative terhadap *tax avoidance* memiliki arti bahwa semakin

- besarnya kepemilikan institusional akan membuat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dapat dihindari. Keberadaan pemilik institusional ikut berperan aktif mengawasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. Keberadaan pemilik institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk tidak melakukan kebijakan pajak agresif. Pemilik institusional mengharapkan perusahaan memberikan kontribusi untuk pembangunan dalam bentuk pembayaran pajak. Keberadaan pemilik institusional dalam mekanisme tata kelola perusahaan berfungsi sebagai penghambat keputusan penghindaran pajak (Puspita & Harto, 2014).
2. Variabel kepemilikan manajerial (X2) memiliki nilai probabilitas (p-value) $0.0045 < 0.05$, sesuai ketentuan pengambilan keputusan maka $H_{0,3}$ ditolak yang berarti kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap *tax avoidance* secara parsial. Semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen maka akan mengurangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingan pribadi. Kepemilikan manajerial akan memberi motivasi kepada manajer untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham.
 3. Variabel komisaris independen (X3) memiliki nilai probabilitas (p-value) $0.0019 < 0.05$, sesuai ketentuan pengambilan keputusan maka $H_{0,4}$ ditolak yang berarti komisaris independen memiliki pengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap *tax avoidance* secara parsial. Alasan yang mendasari kesimpulan ini bahwa pengangkatan komisaris independen oleh perusahaan. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa kinerja komisaris independen yang seharusnya dapat mengurangi angka penghindaran pajak didalam perusahaan tidak berjalan dengan efektif. Kendala yang cukup menghambat kinerja komisaris independen karena sebagian komisaris independen masih lemah dalam kompetensi dan integritasnya. Hal ini terjadi karena pengangkatan komisaris independen sebagian hanya didasarkan atas penghargaan semata, adanya hubungan keluarga (*family*) atau kenalan dekat (*nepotisme*). Oleh karena itu seharusnya persyaratan untuk dapat diangkat sebagai komisaris independen seharusnya sangat ketat, antara lain memiliki integritas dan kompetensi yang memadai sehingga kinerja komisaris dapat lebih ditingkatkan dan penghindaran pajak dalam perusahaan dapat diminimalisir.
 4. Variabel komite audit (X4) memiliki nilai probabilitas (p-value) $0.3017 > 0.05$, sesuai ketentuan pengambilan keputusan maka $H_{0,5}$ diterima yang berarti komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* secara parsial. Keberadaan komite audit yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasional tidak berjalan dengan baik. Sriwedari (2009) menjelaskan bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan. Keberadaan komite audit dalam mekanisme tata kelola perusahaan kurang berperan aktif dalam penetapan kebijakan terkait kebijakan beban pajak yang terkait dengan aktivitas penghindaran pajak. Banyak sedikitnya jumlah anggota komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak efektif perusahaan. Penambahan anggota komite audit hanya untuk memenuhi regulasi pada Peraturan BAPEPAM nomor Kep-20/PM/2004 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002 tentang pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara (bagi BUMN) yang menetapkan komite audit terdiri dari paling kurang 3(tiga) orang anggota.
 5. Variabel karakteristik eksekutif (X5) memiliki nilai probabilitas (p-value) $0.0019 < 0.05$, sesuai ketentuan pengambilan keputusan maka $H_{0,6}$ ditolak yang berarti karakteristik eksekutif memiliki pengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap *tax avoidance* secara parsial. Artinya apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker* maka akan semakin besar tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko. Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* yang cenderung untuk menghindari risiko

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Corporate Governance* (Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit), Karakteristik Eksekutif dan *Tax Avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2013 :
 - a. Dari 85 sampel terdapat 41 data yang memiliki nilai kepemilikan institusional di atas rata-rata dan 44 data yang memiliki nilai kepemilikan institusional di bawah rata-rata.
 - b. Dari 85 sampel terdapat 39 data yang memiliki nilai kepemilikan manajerial di atas rata-rata dan 46 data yang memiliki nilai kepemilikan manajerial di bawah rata-rata.

- c. Dari 85 sampel penelitian terdapat 31 data yang memiliki nilai komisaris independen di atas rata-rata dan 54 data yang memiliki nilai komisaris independen di bawah rata-rata.
 - d. Dari 85 sampel penelitian terdapat 59 data yang memiliki nilai komite audit di atas rata-rata dan 26 data yang memiliki nilai komite audit di bawah rata-rata.
 - e. Dari 85 sampel penelitian terdapat 35 data yang memiliki nilai karakteristik eksekutif di atas rata-rata dan 50 data yang memiliki nilai karakteristik eksekutif di bawah rata-rata.
 - f. Dari 85 sampel penelitian terdapat 28 data yang memiliki nilai *tax avoidance* di atas rata-rata dan 57 data yang memiliki nilai *tax avoidance* di bawah rata-rata.
2. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen Secara Simultan
Berdasarkan hasil pengujian, variabel bebas yaitu *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit), karakteristik eksekutif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013.
 3. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen Secara Parsial
 - a. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*:
 - (i) Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan dan memiliki arah negative terhadap *tax avoidance*.
 - (ii) Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan dan memiliki arah negative terhadap *tax avoidance*.
 - (iii) Komisaris Independen berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap *tax avoidance*.
 - (iv) Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
 - b. Karakteristik Eksekutif berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap *tax avoidance*.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan beberapa saran bagi penelitian selanjutnya, yaitu: 1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengganti objek penelitian pada emiten sektor lain yang ada di Bursa Efek Indonesia, misalnya emiten sektor pertambangan, emiten sektor keuangan dan jenis sektor lainnya yang ada di Bursa Efek Indonesia. 2) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk mengukur *tax avoidance*, seperti *Cash ETR* atau *Long Run Cash ETR* sebagai proksi *tax avoidance*, atau kualitas audit sebagai proksi *corporate governance*. 3) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain untuk mengetahui pengaruhnya terhadap *tax avoidance*, karakteristik perusahaan, *cost of debt* dan lain-lain

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan saran bagi praktisi dan pengguna lainnya, yaitu 1) Bagi Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hasil penelitian ini selanjutnya dapat menjadikan perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan penghindaran pajak yang digunakan dalam perusahaan agar terhindar dari sanksi administrasi pajak. Perusahaan juga dapat lebih memperhatikan pengangkatan komisaris independen dalam perusahaan, dimana pengangkatan komisaris independen harus sesuai dengan aturan yang ada, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir. Begitu juga dengan komite audit dalam perusahaan seharusnya fungsinya lebih ditegakkan, bukan untuk memenuhi regulasi yang berlaku saja. Agar penghindaran pajak dapat diminimalisir di dalam perusahaan sehingga tidak menimbulkan kerugian pada negara. 2) Bagi Investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam melakukan analisis laporan keuangan untuk memahami praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan. 3) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan input alternatif terhadap berbagai pertimbangan kebijakan Peraturan Perundang-Undangan untuk meminimalisasi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

Daftar Pustaka :

- [1] Agoes, Sukrisno dan Ardana, I Cenik. (2009). *Etika Bisnis Dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- [2] Aini, Nur Nike. dan Cahyonowati, Nur. (2011). *Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. (Skripsi tidak terpublikasi). Universitas Diponegoro Semarang.
- [3] Bovi, Maurizio. (2005). *Book-Tax Gap, An Income Horse Race*. Working Paper No. 61.
- [4] Budiman, Judi dan Setiyono. (2011). *Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Jurnal SNA 15 Banjarmasin 2011.

- [5] Dyreng, Hanlon. (2008). *The Effects of Managers of Corporate Tax Avoidance*. Amerika: University of North Carolina.
- [6] Gunarsih, Tri. (2003). "Riset Empiris Dalam Corporate Governance." Seminar Sehari: Issues Application & Research In Corporate Governance.
- [7] Hanum, Hashemi Rodhian. (2013). *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate*. (Skripsi tidak terpublikasi). Universitas Diponegoro Semarang.
- [8] Jaya, Tresno Eka., Yasser, M. dan Kartika, Dinda. (2012). *Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi dan Tax Avoidance*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- [9] Wulandari, Ndaruningpuri. (2005). *Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Di Indonesia*. Vol. 1(2), 120-136. Fokus Ekonomi.
- [10] Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- [11] Kirchler, Maciejovsky dan Schneider. (2002). *Everyday representations of tax avoidance, tax evasion dan tax flight. Do legal differences matter*. Vol.24. Journal of economics Psychology.
- [12] Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara.
- [13] Kurnia, Siti. (2010). *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal"*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [14] Nurmantu, Safri. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- [15] Pohan, H. T. (2008). *Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik*. Didapat dari : <http://hotmanpohan.blogspot.com>
- [16] Pujiati, Diyah dan Widanar, Erman. (2009). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan: Keputusan Keuangan sebagai Variabel Intervening*. Vol. 12(1), 71-86. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Ventura.
- [17] Shleifer, A., dan Vishney, R. 1986. *Large Shareholders and Corporate Control*. Vol 94, 461-488. Journal of Political Economy.
- [18] Siahaan, Sarnita Basani. (2012). *Pengaruh Corporate Governane, Kepemilikan Keluarga dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. (Skripsi tidak terpublikasi). Universitas Telkom.
- [19] Sriwedari, Tuti. (2009). *Mekanisme Good Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. Tesis, Universitas Sumatera Utara
- [20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.